

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum

Berikut adalah tinjauan tentang deskripsi umum lokasi penelitian yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tempat penelitian. Penelitian skripsi ini dilakukan di Kota Semarang. Untuk memahami situasi secara keseluruhan, penulis memperoleh data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait optimalisasi pelayanan publik melalui *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah di Wilayah Kota Semarang. Data lapangan yang diperoleh melalui observasi dan penelitian dokumen, termasuk data laporan dan sumber yang terkait dengan penelitian, dipresentasikan oleh penulis. Oleh karena itu, data yang diperoleh relevan dengan kondisi di Kota Semarang.

Visi dan Misi Kota Semarang tertera dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021, dengan Visi untuk menciptakan "*Semarang sebagai Kota Metropolitan yang Religius, Tertib, dan Berbudaya*". Misi Kota Semarang untuk periode tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas.
2. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik.

3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan.
4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal.

Misi kedua, yaitu meningkatkan pelayanan publik dengan mewujudkan pemerintahan yang lebih handal, didasarkan pada kebutuhan akan pelayanan publik yang telah diidentifikasi dalam Visi pembangunan daerah. Dalam hal ini, misi tersebut menegaskan pentingnya implementasi otonomi daerah yang nyata, efektif, efisien, dan akuntabel sebagai prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini mencakup penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang unggul kepada masyarakat sambil menjaga supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dan melayani merupakan tujuan dari misi kedua yang bertujuan untuk mencapai tata kelola pemerintah yang efektif dan melayani, yang merupakan bagian integral dari upaya meningkatkan kualitas layanan publik. Kesuksesan pemerintahan yang handal sangat bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Ini mencakup aspek-aspek seperti penerapan prinsip-prinsip pelayanan publik yang berkualitas, demokrasi, alokasi anggaran yang tepat, pencegahan korupsi, serta pematuhan terhadap disiplin anggaran. Selain itu, ini juga melibatkan fasilitasi terhadap sektor swasta dan partisipasi masyarakat melalui kebijakan publik yang relevan. Gambaran umum lainnya akan disajikan meliputi gambaran umum Kota Semarang yang akan dijabarkan sebagai berikut:

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Semarang

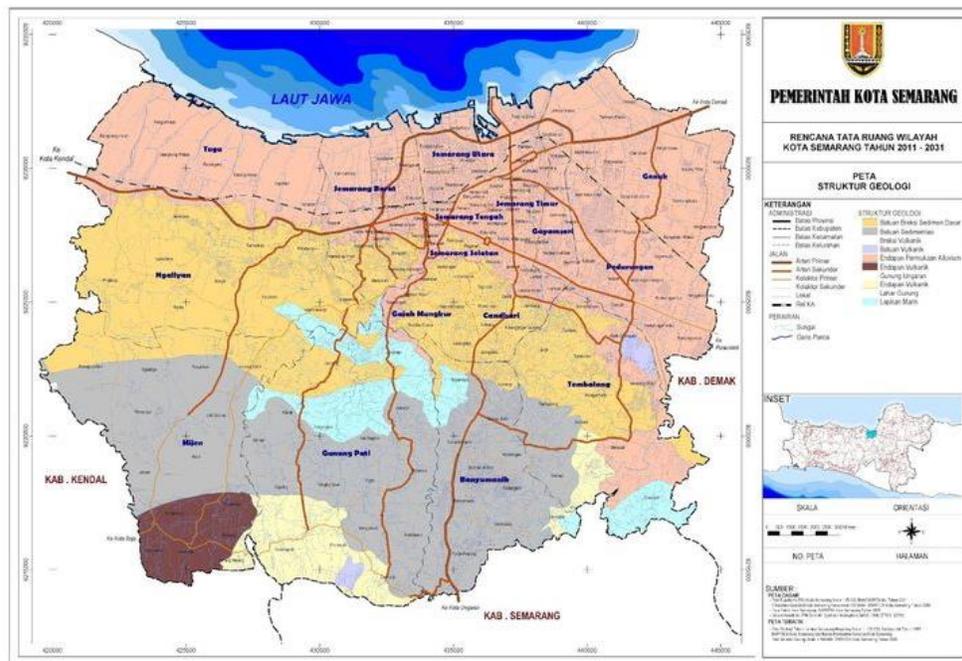
Kota Semarang, sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, telah berdiri sejak tanggal 2 Mei 1547. Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang menempati posisi sebagai kota terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Kota Semarang juga memiliki 5 (lima) julukan unik yaitu *Venetië van Java* (Venesianya Pulau Jawa), Kota Lumpia, Kota Atlas akronim (Aman, Tertib, Lancar, Asri dan Sehat) sebagai slogan pemeliharaan keindahan kota, *The Port of Java* (Pelabuhannya Jawa), Semarang Pesona Asia sebagai slogan pariwisata Kota Semarang.

Di samping sebagai pusat perekonomian dan perindustrian Semarang juga merupakan salah satu kota pariwisata di Jawa Tengah. Kota Semarang memiliki 3 (tiga) pusat *Central Business District* (CBD) yang disebut *Golden Triangle Business District* dan 5 (lima) CBD yang sedang berkembang. Hal tersebut menjadikan Kota Semarang memiliki tingkat aktivitas yang tinggi sehingga Kota Semarang sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, memiliki koneksi yang baik dengan pelabuhan, bandara, stasiun, dan terminal, mempermudah mobilitas dari dan ke kota ini. Wilayah Semarang seluas 373,70 km², berbatasan dengan Kabupaten Kendal di barat, Kabupaten Semarang di selatan, Kabupaten Demak di timur, serta Laut Jawa di utara,

dengan garis pantai sekitar 13,6 km. Kondisi geografis kota Semarang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2. 1

Peta Kota Semarang



Sumber: Satu Data Kota Semarang

Kota Semarang dikenal karena letak geografisnya yang strategis di Pulau Jawa, berada pada jalur vital ekonomi. Secara geografis, kota ini terletak antara 6° 50' – 7°10' Lintang Selatan dan 109° 35'–110° 50' Bujur Timur. Di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, Timur dengan Kabupaten Demak, Barat dengan Kabupaten Kendal, dan Selatan dengan Kabupaten Semarang. Suhu udaranya berkisar antara 20-30°C dengan rata-rata 27°C. Ketinggian Kota Semarang berkisar antara 0,75 hingga 359 meter di atas

permukaan laut. Kota ini terbagi menjadi daerah dataran tinggi dan dataran rendah. Wilayah perbukitan di sebelah selatan, dikenal sebagai Semarang Atas, memiliki ketinggian antara 90 hingga 359 meter di atas permukaan laut. Sedangkan daerah dataran rendah, atau Semarang Bawah, berkisar antara 0,75 hingga 3,5 meter di atas permukaan laut, dengan jarak sekitar 13,6 kilometer. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2. 1
Letak Geografis Kota Semarang

Uraian	Letak Bujur-Lintang	Batas Wilayah
Setelah Utara	6°50' LS	Laut Jawa
Sebelah Selatan	7°10' LS	Kab. Semarang
Sebelah Barat	109°50' BT	Kab. Kendal
Sebelah Timur	110°35' BT	Kab. Demak

Sumber: semarangkota.bps.go.id

Ibu kota Jawa Tengah dengan lokasinya yang strategis, menjadi basis pembangunan utama di wilayah tersebut, terdiri dari empat simpul transportasi utama: koridor pantai utara, koridor selatan, koridor timur, dan koridor barat. Kota Semarang, sebagai pusat utama, memiliki peran yang sangat signifikan dalam kemajuan Jawa Tengah, terutama karena keberadaan

pelabuhan untuk transportasi laut, jalur kereta api dan jalan raya, serta bandara yang menjadi sumber potensial bagi transportasi di Jawa Tengah.

2.1.2 Kondisi Demografi Kota Semarang

Secara administratif, Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Dua kecamatan terluas dan terkecil di Kota Semarang terletak di bagian selatan. Kecamatan terluas, Gunungpati, terletak di daerah perbukitan yang sebagian besar masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan, dengan luas wilayah mencapai 58,27 km². Sedangkan Kecamatan Mijen, yang juga terletak di wilayah perbukitan, memiliki luas wilayah sebesar 56,52 km². Di sisi lain, Kecamatan Semarang Timur adalah yang terkecil dengan luas wilayah 5,42 km², diikuti oleh Kecamatan Semarang Tengah yang hanya memiliki luas wilayah sebesar 5,17 km².

Wilayah kecamatan yang paling kecil di Kota Semarang merupakan pusat kota yang juga berfungsi sebagai pusat ekonomi atau bisnis kota. Kebanyakan area di kecamatan ini dihiasi oleh bangunan-bangunan bersejarah, seperti Kawasan Simpang Lima, Kawasan Tugu Muda, Pasar Bulu, Pasar Peterongan, Pasar Johar, dan sekitarnya yang dikenal sebagai "Kota Lama" Semarang. Dalam tabel di bawah ini, dibandingkan luas wilayah Kota Semarang dengan luas masing-masing kecamatan yang ada di Semarang sebagai berikut:

Tabel 2. 2

Perbandingan Luas Wilayah Kota Semarang (2022)

Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)
Mijen	56.52
Gunungpati	58.27
Banyumanik	29.74
Gajahmungkur	9.34
Semarang Selatan	5.95
Candisari	6.40
Tembalang	39.47
Pedurungan	21.11
Genuk	25.98
Gayamsari	6.22
Semarang Timur	5.42
Semarang Utara	11.39
Semarang Tengah	5.17
Semarang Barat	21.68
Tugu	28.13
Ngaliyan	42.99
Kota Semarang	373.78

Sumber: BPS Kota Semarang

Data yang terkumpul dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang menunjukkan bahwa penduduk kota Semarang diperkirakan mencapai 1.659.975 orang pada tahun 2022. Dalam periode satu tahun terakhir, jumlah penduduk Kota Semarang meningkat sebanyak 3.411 orang. Di bawah ini

disajikan data jumlah penduduk di setiap kecamatan Kota Semarang berdasarkan jenis kelamin untuk tahun 2020-2022 sebagai berikut:

Tabel 2. 3

Jumlah Penduduk Kota Semarang (tahun 2020-2022)

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)					
	Laki-laki			Perempuan		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Mijen	40520.00	41695.00	42908.00	40386.00	41626.00	42910.00
Gunungpati	49023.00	49179.00	49341.00	49000.00	49164.00	49333.00
Banyumanik	70074.00	69891.00	69717.00	72002.00	71798.00	71602.00
Gajahmungkur	27592.00	27396.00	27204.00	28640.00	28461.00	28286.00
Semarang Selatan	30168.00	29954.00	29744.00	31862.00	31662.00	31468.00
Candisari	37232.00	36967.00	36709.00	38224.00	37985.00	37752.00
Tembalang	94453.00	95369.00	96306.00	95227.00	96191.00	97174.00
Pedurungan	95791.00	95725.00	95667.00	97360.00	97403.00	97458.00
Genuk	61884.00	63182.00	64514.00	61426.00	62785.00	64182.00
Gayamsari	34912.00	34664.00	34421.00	35349.00	35128.00	34913.00
Semarang Timur	32181.00	31952.00	31729.00	34121.00	33907.00	33698.00
Semarang Utara	58051.00	57692.00	57341.00	59554.00	59128.00	58713.00
Semarang Tengah	26373.00	26186.00	26002.00	28691.00	28510.00	28336.00
Semarang Barat	73130.00	72610.00	72102.00	75749.00	75275.00	74813.00
Tugu	16457.00	16515.00	16575.00	16365.00	16433.00	16504.00
Ngaliyan	70600.00	70808.00	71025.00	71127.00	71323.00	71528.00
Kota Semarang	818441.00	819785.00	821305.00	835083.00	836779.00	838670.00

Sumber: BPS Kota Semarang

Dengan jumlah penduduk yang demikian, Semarang berada di peringkat keempat di antara kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Jawa Tengah. Pertumbuhan populasi Kota Semarang telah mengalami peningkatan dalam periode 2020-2022, sebagaimana yang tergambar dalam data tentang laju pertumbuhan penduduk di sana. Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2020 hingga 2022 yaitu 0,59% (2020), 0,25% (2021), 0,21% (2022).

Penyebaran penduduk di berbagai kecamatan Kota Semarang masih belum merata, contohnya di Kecamatan Semarang Timur yang saat ini memiliki populasi paling padat, sementara Kecamatan Tugu memiliki tingkat kepadatan paling rendah. Berikut adalah data jumlah penduduk dalam beberapa tahun terakhir:

Tabel 2. 4
Jumlah Penyebaran Penduduk Kota Semarang

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Kepadatan Penduduk		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Mijen	80906.00	83321.00	85818.00	1431.38	1474.10	1518.28
Gunungpati	98023.00	98343.00	98674.00	1682.17	1687.66	1693.34
Banyumanik	142076.00	141689.00	141319.00	4776.90	4763.89	4751.45
Gajahmungkur	56232.00	55857.00	55490.00	6018.11	5977.97	5938.69
Semarang Selatan	62030.00	61616.00	61212.00	10431.67	10362.05	10294.11
Candisari	75456.00	74952.00	74461.00	11795.38	11716.59	11639.84
Tembalang	189680.00	191560.00	193480.00	4805.74	4853.37	4902.02
Pedurungan	193151.00	193128.00	193125.00	9149.89	9148.80	9148.66
Genuk	123310.00	125967.00	128696.00	4746.52	4848.79	4953.84
Gayamsari	70261.00	69792.00	69334.00	11296.14	11220.74	11147.11
Semarang Timur	66302.00	65859.00	65427.00	12228.63	12146.92	12067.24
Semarang Utara	117605.00	116820.00	116054.00	10322.85	10253.94	10186.71
Semarang Tengah	55064.00	54696.00	54338.00	10643.31	10572.18	10502.98
Semarang Barat	148879.00	147885.00	146915.00	6868.19	6822.33	6777.58
Tugu	32822.00	32948.00	33079.00	1167.00	1171.48	1176.14
Ngaliyan	141727.00	142131.00	142553.00	3296.92	3306.32	3316.14
Kota Semarang	1653524.00	1656564.00	1659975.00	4423.79	4431.92	4441.05

Sumber: BPS Kota Semarang

2.2 Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah

2.2.1 Gambaran Umum Direktorat Lalu Lintas

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda merupakan lembaga atau unit organisasi dan pelaksanaan di tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Dimana memiliki tanggung jawab atas pengaturan, pengawasan, penegakan hukum terkait lalu lintas kendaraan bermotor. Lembaga ini merupakan bagian dari kepolisian atau instansi pemerintah yang bertugas mengatur dan mendukung pelaksanaan Operasi Kepolisian Tingkat Kewilayahan. Visi dari polisi lalu lintas adalah mewujudkan sosok polantas yang profesional, berakhlak baik, dan modern sebagai penjaga, pelindung, serta pelayan masyarakat, dengan tujuan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Sementara itu, misi dari polantas adalah 1) memberikan perlindungan, pengawalan, dan pelayanan kepada pengguna jalan agar mereka merasa aman dan sampai ke tujuan dengan selamat; 2) memberikan arahan kepada masyarakat dalam berlalu lintas melalui tindakan preventif untuk meningkatkan kesadaran, ketaatan, dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas; 3) menegakkan aturan lalu lintas secara profesional dan proporsional, dengan menghormati supremasi hukum dan hak asasi manusia; 4) menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dengan mematuhi norma-norma dan

nilai-nilai hukum yang berlaku; 5) meningkatkan konsolidasi internal sebagai upaya untuk menyelaraskan misi polantas.

2.2.2 Deskripsi Logo Direktorat Lalu Lintas



Sumber: Korlantas Polri

Berikut penjabaran makna dari logo Direktorat Lalu Lintas sebagai berikut:

1. Roda

Lambang “Kecepatan Bergerak” atau “*Mobile*” adalah kesiapsiagaan dan ketanggapsegeraan setiap anggota Polantas dalam pengabdian sebagai aparat penegak hukum, pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat dalam rangka terbinanya ketentraman masyarakat guna

terwujudnya keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas.

2. Tameng

Lambang “Perlindungan” adalah setiap anggota Polantas memiliki kemampuan dan ketrampilan serta ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan mental kepribadian yang berjiwa Tri Brata dan Catur Prasetya dalam rangka tugas melindungi masyarakat dari setiap gangguan kantibmas.

3. Jari-jari Tameng

Memiliki jumlah 22 yang diartikan sebagai tanggal lahir Polantas yaitu tanggal 22.

4. Garis Marka

Berjumlah 9 yang diartikan sebagai bulan ke 9 yaitu September yang merupakan bulan lahirnya Polantas.

5. Rantai

Berjumlah 2 diartikan sebagai kewenangan Polantas

6. Tiga Bintang

Menggambarkan simbol lalu lintas, urat nadi kehidupan, cermin budaya, dan cermin tingkat modernitas

7. Padi dan Kapas

Berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat

8. Sayap

Lambang inisiatif, melindungi, dan mempermudah Gerakan pelaksanaan tugas dari Polantas untuk melindungi setiap pemakai jalan dan memberi rasa aman dan nyaman dalam berlalu lintas. Gambar sayap terdiri dari tiga bagian yang menjadi jiwa dan semangat pengabdian bagi setiap anggota Polantas.

- a) Sayap dengan lima helai berarti Pancasila
 - b) Sayap dengan tiga helai berarti Tri Brata
 - c) Sayap dengan empat helai berarti Catur Prasetya
9. Seloka bertuliskan “**Dharma Kerta Marga Raksyaka**”
- a) Dharma Kerta : Sebagai sasaran pengabdian
 - b) Marga : Jalan raya dan setiap pengguna jalan
 - c) Raksyaka : Memberi perlindungan dan pelayanan pengguna jalan

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Polantas bertugas dengan penuh dedikasi dan kesadaran, serta memberikan perhatian dan tanggung jawab yang besar dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dengan tujuan memberikan perlindungan, bantuan, dan layanan kepada masyarakat demi peningkatan kesejahteraan mereka.

2.2.3 Tugas dan Fungsi Direktorat Lalu Lintas

Berikut merupakan tugas utama Direktorat Lalu Lintas mencakup berbagai hal seperti:

1. Pengaturan Lalu Lintas: Menetapkan aturan dan tanda-tanda lalu lintas, serta mengembangkan kebijakan untuk meningkatkan kelancaran dan keamanan lalu lintas.
2. Penegakan Hukum: Menyelidiki dan menindak pelanggaran lalu lintas, seperti pelanggaran batas kecepatan, penggunaan handphone saat berkendara, dan pelanggaran lainnya.
3. Pendidikan dan Kampanye Keselamatan: Melakukan inisiatif pendidikan dan menggelar kampanye keselamatan jalan raya bertujuan untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai peraturan lalu lintas serta signifikansinya dalam beraktivitas di jalan dengan aman.
4. Pengendalian dan Pemantauan: Melakukan pemantauan lalu lintas menggunakan teknologi seperti kamera pengawas, sistem pemantauan kendaraan, dan alat-alat lainnya untuk mengidentifikasi dan menanggapi kejadian lalu lintas.
5. Penyelidikan Kecelakaan: Menyelidiki kecelakaan lalu lintas untuk menentukan penyebabnya dan melakukan tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya kejadian yang sama di waktu yang akan datang.

Berikut Direktorat Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:

1. Pembentukan kebijakan strategis terkait peran dan fungsi polisi lalu lintas, pengembangan sistem dan metode, serta kerjasama baik

domestik maupun internasional, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan di bidang lalu lintas;

2. Penyelenggaraan manajemen operasional lalu lintas untuk memastikan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di berbagai jenis jalan, termasuk pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, dan integrasi dengan *National Traffic Management Centre* (NTMC);
3. Pengembangan sistem penegakan hukum termasuk penindakan pelanggaran aturan lalu lintas, penanganan kecelakaan, penyidikan, serta koordinasi dengan instansi terkait;
4. Edukasi masyarakat tentang tertib berlalu lintas melalui sosialisasi, pembangunan kesadaran, dan pendidikan formal dan informal;
5. Pengelolaan administrasi dan identifikasi pengemudi serta kendaraan bermotor, termasuk pengecekan dokumen dan uji kompetensi untuk keabsahan dokumen dan penegakan hukum;
6. Analisis keamanan dan keselamatan lalu lintas, pemetaan wilayah, identifikasi masalah, dan perumusan rekomendasi dalam sistem pengisian dan pencatatan data;
7. Pelaksanaan operasional NTMC sebagai pusat kendali data lalu lintas, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan pelayanan informasi terkait pelanggaran dan kecelakaan..

Tujuan utama dari Direktorat Lalu Lintas adalah memastikan bahwa lingkungan berlalu lintas menjadi aman, teratur, dan efisien bagi semua individu yang menggunakan jalan. Keberadaannya membantu mengurangi risiko kecelakaan, mencegah pelanggaran aturan lalu lintas, dan memberikan kontribusi positif terhadap mobilitas masyarakat secara umum.

2.2.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah representasi visual yang menggambarkan jenis organisasi, pembagian departemen organisasi kedudukan, dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi (Hasibuan, 2010:128). Dalam esensinya, struktur organisasi menjelaskan tugas-tugas diberikan, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara resmi. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan antara fungsi, bagian atau posisi, maupun individu yang memegang peran dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Kerangka kerja organisasi tersebut disebut sebagai design organisasi (*organizational design*) dan bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi dinamakan dengan struktur organisasi (*organizational structure*).

Dimana setiap instansi memang membutuhkan struktur organisasi guna untuk memudahkan dalam mengkoordinasikan kewajiban hal dan komunikasi

antar SDM pada setiap kegiatan didalamnya. Sehingga, akan lebih mudah bagi instansi dalam mencapai tujuannya. Maka dari itu, penulis melampirkan struktur organisasi dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah sebagai berikut:

Gambar 2. 2

Struktur Organisasi Ditlantas Polda Jawa Tengah



Keterangan Unsur Pelaksana Tugas Pokok:

1. Dirlantas : Direktur Lalu Lintas
2. Wadirlantas : Wakil Direktur Lalu Lintas
3. Kasubbag Renmin : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi
4. Kasubdit Gakkum : Kepala Sub Direktorat Penegak Hukum
5. Kasubdit Regident : Kepala Sub Direktorat Registrasi dan Identifikasi

6. Kasubdit Kamsel : Kepala Sub Direktorat Keamanan dan Keselamatan
7. Kasat PJR : Kepala Satuan Patroli Jalan Raya
8. Kasi Laka : Kepala Seksi Laka
9. Kasi GAR : Kepala Seksi GAR
10. Kasi STNK : Kepala Seksi STNK
11. Kasi Dikmas : Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat
12. Kanit 5 Subdit Gakkum : Kepala Unit 5 Sub Direktorat Penegak Hukum
13. Kanit 6 Subdit Gakkum : Kepala Unit 6 Sub Direktorat Penegak Hukum
14. Kasubbag TIK : Kepala Bagian Teknologi, Informasi, dan Komunikasi
15. Bid. Sistem dan Apps
16. Bid. *Back Office*
17. Bid. Regulasi
18. Bid. Audit

Pada pelaksanaan sistem E-TLE oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah sendiri dilakukan oleh fungsi Kasubdit Ops E-TLE yang dipimpin oleh Kanit 5 Subdit Gakkum. Kasubdit Ops E-TLE melibatkan beberapa peran yang berbeda. Pertama, terdapat petugas *backoffice* yang terdiri dari petugas analisis dan verifikasi. Tugas mereka adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi pelanggaran lalu lintas yang

terdeteksi oleh perangkat elektronik E-TLE. Selain itu, ada juga petugas penanggungjawab surat konfirmasi yang bertugas mengeluarkan surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan bermotor yang sesuai dengan *Database Electronic Registration and Identification* (ERI). Selanjutnya, terdapat petugas tilang yang bertanggung jawab untuk memeriksa balasan surat konfirmasi dari pemilik kendaraan atau pelanggar lalu lintas melalui berbagai media, termasuk jasa pengiriman dan kunjungan langsung ke Posko E-TLE. Selain itu, ada juga petugas admin yang bertugas membuat nota dinas untuk mengajukan blokir atau membuka blokir STNK kepada petugas Samsat. Dan yang terakhir, ada petugas Yanduan yang bertanggung jawab atas penerimaan pengaduan masyarakat di Posko E-TLE Subdit Gakkum.

Untuk pembinaan dan penyuluhan mengenai pelaksanaan sistem E-TLE dijalankan oleh Kasubsatgas Bin E-TLE. Pembinaan dan penyuluhan biasanya dalam bentuk kegiatan sosialisasi serta edukasi terkait keselamatan berlalu lintas dan pelaksanaan sistem E-TLE yang dipimpin oleh Kanit 6 Subdit Gakkum dan anggota. Langkah-langkah yang diambil oleh petugas lalu lintas di Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk mengedukasi dan mensosialisasikan keselamatan berlalu lintas kepada para pengguna jalan di Kota Semarang melibatkan penggunaan spanduk dan brosur. Tujuan dari kegiatan edukasi dan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keselamatan saat beraktivitas di jalan raya, demi keselamatan Bersama.